

Rapat Dengar Pendapat DPRD Kalteng, Penegakan Hukum Penggunaan Jalan Ditegakan

Indra Gunawan - PULANGPISAU.PUBLIKINDONESIA.COM

Aug 23, 2022 - 23:31



Gambar: Kondisi Ruas Jalan Palangka Raya - Kuala Kurun Beberapa Waktu lalu dengan kondisi rusak oleh angkuta PBS

PALANGKA RAYA - Rapat Dengar Pendapat (RDP), terkait penggunaan ruas jalan Kuala Kurun - Palangka Raya, oleh Perusahaan Besar Swasta (PBS), baik yang ada beraktivitas produksi di wilayah Kab Gunung Mas (Gumas) dan wilayah

sekitar, menjadi agenda DPRD Kalimantan Tengah.

DPRD Kalteng, mengundang sejumlah Forkompinda dan perwakilan masyarakat Gumas, di wakikan oleh Aliansi Masyarakat Gumas, melaksanakan Rapat Dengar pendapat, untuk menindaklanjuti permasalahan selama ini.

Pada pertemuan tersebut, disepakati beberapa poin - poin untuk ditindak lanjuti kedepannya, terutama bagi para PBS yang melewati ruas jalan itu.

Selain itu juga katanya, akan segera dibentuk tim percepatan jalan koridor, untuk PBS yang beroperasi di wilayah Kabupaten sekitarnya. Tentunya apa yang dibahas di DPRD Kalteng tadi siang, terkait ruas jalan Palangka Raya - Kuala Kurun, sangat diharapkan masyarakat khususnya, masyarakat Gumas.

Jalan yang merupakan urat nadi masyarakat dalam beraktivitas, khususnya masyarakat Gumas, terganggu akibat aktivitas beberapa PBS, khususnya angkutan batu bara, kayu dan kelapa sawit (CPO).

Baik melalui dana konsorsium dan dana APBD I Kalimantan Tengah, jalan tersebut selalu rusak kembali akibat dilalui oleh angkutan yang melebihi Tonase, sesuai Perda 7 Tahun 2012 Kalteng dan peraturan perundangan.

"Pembahasan utama menekan agar pihak PBS membuat jalan koridor sendiri dalam angkutan hasil produksinya dan penegakan hukum terkait penggunaan jalan serta tonase sesuai aturan hukum yang ada," terangnya.

Poin poin yang dihasilkan dalam RDP oleh DPRD Kalteng, ada 9 (Sembilan) poin, yaitu. Pengetatan penggunaan jalan ruas Palangka Raya - Kuala Kurun sesuai peraturan yang ada, evaluasi pelaksanaan kegiatan Konsersium, penegakan hukum terkait penggunaan jalan terkait tonase, perlu jalan alternatif/koridor alternatif.

Mendesak izin jalan koridor ke Pemerintah pusat, melakukan pengetatan selama perbaikan jalan, usulan pembangunan jembatan timbang yang akan dibahas tahun anggaran 2023, perlu tim khusus dalam pembangunan jalan koridor, dan perusahaan wajib melakukan pengawasan dalam angkutan tonase.

Dalam RDP itu, dihadiri dan disepakati semua yang hadir, terdiri dari, Ketua DPRD Kalteng, Polda Kalteng, Kapolres Gunung Mas, Pemda Gunung Mas, DPRD Kab Gunung Mas dan Ketua Aliansi Masyarakat Gunung Mas.

"Dengan di fasilitasi oleh DPRD Gunung Mas, DPRD Kalteng, terutama pihak - pihak PBS, artinya kita sama - sama mengawasinya," tutup Yepta.